



# Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pengelolaan Kartu Prakerja

## POIN UTAMA

- 1) Program Kartu Prakerja merupakan program penting yang berpengaruh besar dalam meningkatkan kemampuan peserta sekaligus menjadi dukungan pendapatan ditengah tekanan ekonomi.
- 2) Pengawasan implementasi Program Kartu Prakerja dapat dilaksanakan dengan memastikan sistem berjalan dengan optimal, memastikan relevansi pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
- 3) Pembenahan dari segi pelaksanaan perlu dilakukan dalam hal optimalisasi fitur-fitur pelatihan yang diharapkan dapat mendayagunakan lulusan program kartu prakerja.
- 4) Dari segi hukum, pelaksana harus mampu memastikan bahwa tidak ada permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak pada temuan hasil pemeriksaan BPK RI hingga permasalahan hukum lainnya.

**Penanggung Jawab:** Helmizar

**Ketua:** Fajri Ramadhan

**Anggota:** Kiki Zakiah, Teuku Surya Darma, Slamet Dhul Fadli, Hafiz Dwi Putra, Dwimo Gogy Prabowo, Cahyo Bagaskara

## ISU STRATEGIS

Dalam rangka merespon dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah menetapkan kebijakan belanja yang terfokus untuk penanggulangan Covid-19 melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan alokasi anggaran tahun 2020 dan 2021 masing masing sebesar Rp695,2 triliun dan Rp699,43 triliun. Pelaksanaan Program PC-PEN diantaranya ditujukan pada Sektor Perlindungan Sosial dengan salah satu programnya yaitu **Kartu Prakerja**. Program Kartu Prakerja bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja dianggarkan sebesar Rp20 triliun untuk tahun 2020 dan tidak mengalami perubahan anggaran di tahun 2021. Anggaran tersebut dialokasikan dan disalurkan untuk masing-masing penerima sebesar Rp3.550.000,00 dengan rincian biaya pelatihan (Rp1 juta), insentif pelatihan (Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan), dan insentif survey (Rp150 ribu untuk tiga kali survei).

Pada tahun 2020, telah terealisasi anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp19,63 triliun atau 98,17%. Sampai dengan 27 Juni 2021, telah dibuka 17 gelombang pendaftaran Kartu Prakerja dengan total 8,80 juta (efektif 8,28 juta) peserta program yang lolos dari 65,60 juta registrasi di situs prakerja.go.id. Terdapat 7 *Platform Digital* (satu diantaranya adalah Sisnaker milik Kemnaker), 222 lembaga pelatihan, 1.498 pelatihan, dan lima mitra pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Mengingat perbedaan harga oleh penyedia yang berdasarkan mekanisme pasar, menjadi hal yang penting untuk memastikan kualitas pelatihan benar-benar bermutu dan mampu memberikan kebermanfaatn bagi peserta. Pelatihan juga harus mampu menjawab tantangan penurunan ketersediaan lowongan kerja bagi pencari kerja sebagai dampak pandemi. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, Program Kartu Prakerja telah diaudit oleh 3 (tiga) lembaga yaitu KPK, BPK dan BPKP pada tahap awal pelaksanaan serta juga telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KPPU.

Terkait Program Kartu Prakerja, KPK telah melakukan kajian atas batch 1-3. Berdasarkan kajian KPK tersebut, diketahui terdapat empat potensi permasalahan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, yaitu 1) pendaftaran hanya dilakukan oleh 143 ribu (per 08 Mei 2020) pekerja terdampak dari 1,7 juta pekerja yang terkena PHK (data dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan); 2) adanya konflik kepentingan Platform Digital dengan lembaga pelatihan, mulai dari kesamaan pemilik dan badan usaha; 3) Hanya 24% (dari 1.895) konten pelatihan yang memenuhi syarat lembaga pelatihan dan sebagian besar pelatihan tersedia secara gratis di internet; 4) Dalam pelaksanaannya, hanya 55% konten yang layak untuk pelatihan secara online (sisanya harus secara offline dan kombinasi) serta peserta telah menerima sertifikat dan insentif pelatihan meskipun belum menyelesaikan seluruh paket pelatihan sehingga negara membayar pelatihan yang tidak diikuti peserta. Untuk itu, KPK merekomendasikan penghentian sementara program Kartu Prakerja batch 4 sambil melakukan evaluasi atas pelaksanaan batch sebelumnya dan perbaikan untuk keberlanjutan program.

Menurut BPK RI, pelaksanaan Program Kartu Prakerja masih diikuti berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas yaitu:

- Ketiadaan dukungan data dan dokumen yang valid atas target penerima kartu prakerja yang bersifat terbuka sebanyak 5,6 juta orang dan perubahan anggaran dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dapat menghambat pencapaian tujuan program kartu prakerja.
- Adanya *refocusing* program kartu prakerja menjadi semi-bansos membuat program ini berpotensi tidak tepat sasaran dan tepat guna serta tidak merata karena tumpang tindih dengan pemberian bantuan dari K/L lain yang juga memberikan bantuan kepada penerima yang sama.
- Belum terdapat standar atas biaya jasa pelatihan dan harga pelatihan.
- Terdapat pembayaran biaya pelatihan kepada *platform* digital dan lembaga pelatihan tidak dilakukan berdasarkan pelatihan yang diikuti dan diselesaikan oleh peserta kartu prakerja.

## ISU AKTUAL

- Realisasi pembayaran biaya pelatihan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Juni) tergolong rendah.
- Manajemen pelaksana (PMO) belum memiliki kontrol langsung untuk akses pelatihan peserta.
- Fitur pelatihan masih kurang optimal.
- Potensi tidak tercapainya *outcome* kartu prakerja karena tidak terserapnya lulusan Program Kartu Prakerja di dunia kerja.
- Tidak adanya kepastian hukum yang berpotensi menyebabkan efektivitas implementasi program menjadi rendah.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja serta permasalahan dan solusi perbaikan pelaksanaannya ke depan, maka PKAKN Badan Keahlian Setjen DPR RI menyelenggarakan seminar dan FGD terkait dengan dinamika permasalahan akuntabilitas keuangan negara di masa pandemi COVID-19 khususnya pada pengelolaan program kartu prakerja, dengan narasumber antara lain: Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja, BPKP dan Sivitas Akademika (UNS dan Univ. Trisakti), serta penerima kartu prakerja. Acara tersebut diselenggarakan secara virtual pada tanggal 28 s.d. 29 Juni 2021. Dari paparan dan hasil diskusi, berikut beberapa catatan penting dari para narasumber:

- 1) **Bram Brahmana, Ak., M.Acc (Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP RI)** mengungkapkan adanya kecenderungan penerima Kartu Prakerja lebih memilih mengejar insentif dan kurang memanfaatkan bantuan pelatihan untuk peningkatan kompetensi karena dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, rata-rata hanya digunakan sebesar 36,34% dan 37,90% untuk tahun 2020 dan 2021 (s.d. Juni).
- 2) **Denni Puspa Purbasari, Ph.D. (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja)** menjelaskan bahwa pemanfaatan insentif yang didapatkan peserta program kartu prakerja digunakan paling banyak untuk membeli bahan pangan yaitu sebesar 95%, 74% digunakan untuk membayar Listrik/Air, 70% untuk Modal Usaha, 64% digunakan untuk membeli Bensin/Solar, dan 61% untuk membeli pulsa/paket data internet. Telah ada pengawalan dan audit oleh BPK, BPKP, dan KPK pada tahap awal pelaksanaan Kartu Prakerja serta melakukan konsultasi dengan KPPU. Ditanggal 2 Maret 2021, KPK menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK
- 3) **Prof Izza Marfuhah, S.E., M.Si (Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FEB UNS Surakarta)** memberikan masukan terkait optimalisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Menurut beliau guna mengoptimalkan Program Kartu Prakerja, maka diperlukan *welcoming program* seperti memberikan motivasi dan belanja ide, sehingga peserta akan lebih mudah dalam menentukan minat pelatihan yang akan diambil dalam program kartu prakerja. Pasca pelatihan juga diperlukan adanya *exit program* seperti peningkatan *softskill* (teknik komunikasi, negosiasi, pelaporan keuangan sederhana, dll) agar peserta dapat menjual keahlian yang didapat dari program pelatihan.
- 4) **Dr. Rinaldi Rustam, M.E. (Kaprodin Magister Ilmu Ekonomi Univ. Trisakti dan Konsultan Kebijakan Publik)** mengungkapkan adanya beberapa permasalahan program kartu prakerja, diantaranya adanya indikasi konflik kepentingan pada saat program ini dirumuskan dan diundangkan. Selain itu, terdapat potensi permasalahan hukum Perpres No.36 Tahun 2020, salah satunya yaitu secara kelembagaan pelaksana program Kartu Prakerja dipimpin oleh Komite yang ketuanya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, padahal menurut UU No.13 Tahun 2003 kewenangan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan berada pada menteri yang mengurus bidang ketenagakerjaan.
- 5) **H. Rully Sofyan (Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja)** mengusulkan agar sebelum voucher pelatihan dibagikan sebaiknya diberikan video wajib yang harus ditonton oleh peserta, seperti pengenalan teknologi digital dan entrepreneurship. Sistem yang ada juga sebaiknya dipermudah dan disederhanakan agar peserta yang baru mengenal dunia digital dapat dengan mudah menggunakan fitur atau platform yang disediakan dalam Program Kartu Prakerja.
- 6) **Prof. Dr. Pujiyono, SH., M.H (Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNS)** mengungkapkan bahwa dalam Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) diperlukan adanya kepastian hukum yang berlandaskan pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut beliau, poin terberat ada dalam kepastian hukum karena memiliki sisi diametral dengan keadilan itu sendiri, sehingga, diperlukan aspek kemanfaatan untuk mempertemukannya. Selain itu, terdapat potensi permasalahan dalam Pasal 31b Perpres 76 Tahun 2020 yaitu terkait itikad baik dalam pertanggungjawaban hukum dan dalam mengukur itikad baik. Terdapat pasal-pasal yang memiliki celah dan ketentuan baku yang melindungi satu pihak namun *less* pada pihak lainnya.

## REFERENSI

- BPK RI. 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2020*. Jakarta.
- KPK. 2021. *Paparan Kajian Program Kartu Prakerja*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/> pada 30 Juni 2021
- KPK. 2021. Ringkasan Eksekutif Kajian Program Kartu Prakerja. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/> pada 30 Juni 2021
- Prakerja. 2021. *Buku Laporan Manajemen 2020*. Diakses dari <https://www.prakerja.go.id/publikasi> pada 30 Juni 2021
- Paparan Narasumber. 2021. Dalam FGD *Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pengelolaan Kartu Prakerja*. 28-29 Juni 2021. Jakarta.